

BAB II

DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH

Bab ini akan membahas dinamika politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. Dinamika politik luar negeri Amerika Serikat akan dibagi menjadi dua bagian, yakni keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah pasca keruntuhan Turki Utsmani dan keterlibatan Amerika Serikat dan Uni Soviet di Timur Tengah saat Perang Dingin.

Interaksi Amerika dengan Utsmaniyah dimulai saat kapal-kapal dagang Amerika melintasi perairan Laut Mediterania. Awalnya, kapal-kapal ini berlayar dibawah perlindungan Perancis, namun sayangnya setelah tahun tahun 1778, negara Barbari menyadari kehadiran bendera baru di Mediterania. Sehingga negara Barbari menuntut untuk dibayarkannya upeti. Permintaan Negara Barbari cukup berat direalisasikan oleh Amerika, sebab diawal berdirinya kondisi Amerika tidak memungkinkan untuk membayar upeti terhadap Negara Barbari(Avci, 2016, p. 41). Beban ini semakin menambah berat keuangan Amerika. Sebab, sejak tahun 1775 Amerika telah berhutang dengan Perancis dan Belanda untuk menstabilkan kondisi pasca revolusinya(United States Department of State).

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Amerika mengambil langkah untuk menandatangani perjanjian pada 1795 dengan Hasan Pasha, penguasa Aljazair. Dalam perjanjian disebutkan bahwa Penguasa Aljazair akan menjamin keamanan kapal-kapal Amerika yang melintasi perairan Aljazair. Konsekuensi jaminannya, Amerika siap membayar upeti sebesar \$600.000. Amerika memperpanjang langkahnya dengan bekerjasama dengan Yusuf Karamanli, Pasha Tripoli. Perjanjian antara Amerika dan Pasha Tripoli, yakni Amerika tidak akan membayar pajak tahunan kepada Tripoli, namun mem-

bayar pajak yang telah ditentukan sebesar \$ 57.000 beserta hadiah yang bersifat sementara(Akalin, 2015, p. 2)

Hubungan komersil ini berubah menjadi hubungan diplomatik pasca Perang Pertama Ottoman-Amerika di Mediterania, pada 1801-1805. David Offley adalah pengusaha Amerika yang pertama kali ditugaskan sebagai Konsul AS untuk Utsmani pada tahun 1824 dan pada 1835 Nicholas L Ferrich diangkat menjadi Konsul di Bursa, Turki. Kemudahan Amerika diterima didisisi Ottoman, karena Ottoman membutuhkan aliansi untuk memperkuat angkatan lautnya yang dilumpuhkan oleh angkatan laut Inggris-Perancis-Rusia di Navarino, lepas pantai Yunani, 20 Oktober 1827. Pada 7 Mei 1830, terjadi penandatanganan terkait perjanjian perdagangan dan navigasi. Disisi lain Amerika bersedia membangun kembali kekuatan armada laut Ottoman (Howard, 1976, pp. 292-293).

Pendudukan yang dilakukan Amerika di Timur Tengah tidak hanya sebatas hubungan politik dan komersil, namun juga mencakup sekup pendidikan, medis dan misionaris. Misionaris Amerika berada di Timur Tengah sejak 1820, bertepatan dengan pendirian misi keagamaan Amerika oleh Dewan Komisaris Amerika di Timur Tengah. Para misionaris mengalami kesulitan untuk mengubah Muslim atau Yahudi ke Kristen, sehingga mereka berupaya untuk melakukan modernisasi pendidikan dan mendirikan beberapa perguruan tinggi seperti, Robert College di Turki yang didirikan tahun 1863, Syrian Protestant College yang kini dikenal dengan American University of Beirut (AUB) didirikan oleh Daniel Bliss pada 1866, Istanbul Women's College yang berdiri pada 1871, dan The American University of Cairo yang berdiri pada 1919. Diantara ketiganya, AUB memiliki pengaruh cukup besar terhadap perguruan tinggi di Timur Tengah dan diakhir abad ke sembilan belas, AUB memberi pengaruh bagi kemunculan dan meningkatnya opini nasionalisme Arab (Sarhan A. S., 2017, p. 445).

A. Keterlibatan Amerika Serikat Pasca Perang Dunia I

Awal abad ke-20 menjadi sebuah sejarah panjang yang terus diingat oleh dunia. Sejak negara republik Turki diproklamirkan pada tanggal 29 Oktober 1923, dengan Mustafa Kemal diangkat sebagai Presiden dan didampingi oleh Ismet İnönü sebagai Perdana Menteri. Kekhilafahan dihapuskan pada 3 Maret 1924 dan seluruh anggota *House of Ottoman* diusir dari Turki (Howard, 1976, p. 301). Mustafa Kemal berhasil mendirikan Republik Turki dengan prinsip sekulerisme, modernisme dan nasionalisme. Mustafa Kemal dan pengikutnya melakukan gerakan pembaharuan di bidang politik, hukum, budaya, sosial dan ekonomi. Reformasi konstitusi baru 1924 mengakibatkan lembaga-lembaga syariah dihapuskan dan menutup sekolah-sekolah Islam yang telah berdiri sejak 1300-an. Mustafa Kemal juga melakukan nasionalisme agama. Menurutnya, agama adalah bagian dari lembaga sosial, sehingga agama harus disesuaikan kondisi sosial dan budaya masyarakat Turki. Puncak nasionalisme agama terjadi pada 1932, pemerintah mengeluarkan kebijakan kontraversi dengan mengganti lafadz azan yang berbahasa Arab ke bahasa Turki (Republika, 2016).

Sebelum keruntuhan Utsmaniyah pada awal abad ke-20, Kekhalifahan Utsmani mengalami dua kali kekalahan peperangan. Kekalahan pertama terjadi dari Perang Italia-Turki yang berlangsung pada 29 September 1911-18 Oktober 1912. Perang ini terletak di ibukota Libya modern dan sekitarnya sehingga perang ini dikenal dengan nama Perang Tripolitanian.

Perang Italia-Turki telah dicatat sebagai perang yang menggunakan teknologi canggih, khususnya penggunaan pesawat tempur oleh militer Italia. Biaya tempur yang dikeluarkan oleh Italia berkisar 1,3 miliar lira. Meskipun, perang ini berskala kecil, tapi efeknya cukup memicu gerakan nasionalisme rakyat Balkan (Hasan, Tirto, 2018). Sayangnya dalam perang ini, tidak terlihat sama sekali peran maupun intervensi Amerika Serikat, begitupun pada kekalahan Kekhilafahan

Utsmani pada Perang Balkan. Amerika Serikat memilih untuk bersikap netral, tidak mendukung Italia maupun Utsmani (Howard, 1976, p. 298).

Pasca perang berakhir, Presiden Wilson mengembangkan program untuk Perdamaian di Timur pada Konferensi Perdamaian Paris tahun 1919. Wilson memberikan mandat yang dipimpin oleh Henry Cruchill King dan Charles R. Crane bersama staf ahli untuk memeriksa kondisi dan memberikan rekomendasi untuk perdamaian tersebut. Hasil laporan King dan Crane dipublikasikan secara resmi pada tahun 1947 dengan beberapa rekomendasi yakni, pembentukan satu mandat umum Amerika untuk seluruh Asia Kecil dan untuk Armenia memiliki mandat yang terpisah dengan Negara Turki. Sayangnya rekomendasi ini tidak dapat berjalan dengan baik.

Hubungan Amerika-Turki berangsur-angsur pulih pasca Perang Dunia I dan keruntuhan Khekhilafahan Utsmani. Keduanya menjalin hubungan diplomatik formal atas dasar *modus vivendi*¹ pada 17 Februari 1927. Pada tahun yang sama, Joseph C. Grew diangkat menjadi duta besar untuk Turki dan Muhtar Bey menjadi Duta besar Turki untuk Amerika Serikat. Namun, kedua negara baru membuat perjanjian perdagangan dan navigasi. Perjanjian ini telah memberikan perkembangan yang signifikan dalam hubungan komersil keduanya. Amerika Serikat menduduki peringkat kedua sebagai konsumen dari produk-produk Turki dan peringkat ketujuh sebagai pengeksport ke Turki (Howard, 1976, p. 302).

Pasca Perang Dunia II, kepentingan politik-strategis Amerika Serikat melibatkan komitmen militer. Pada 3 Desember 1941, Presiden Rossvelt menyatakan bahwa Turki menjadi bagian vital dari pertahanan Amerika Serikat, kepentingan Amerika Serikat meluas ke Iran pada tahun 1942 dan pada tahun 1944, Amerika Serikat menyatakan kepentingan vitalnya

¹ Persetujuan sementara antara kedua belah pihak yang bersengketa.

berada di Timur Tengah yang menjadi wilayah penting untuk perdamaian dan keamanan dunia(Howard, 1976, p. 303)

Babepa tahun pasca peryataannya tersebut, Amerika Serikat terlibat dalam Perang Arab-Israel pada 1973, hal ini memaksa Amerika Serikat untuk menentukan keberpihakannya, mendukung negara-negara Arab atau memilih Israel. Colin Shindler menyatakan bahwa Amerika Serikat bimbang, ia berada pada kondisi sulit. Amerika ingin memenangkan dunia Arab tetapi tidak ingin keamanan Israel tergadaikan. Namun, tatkala Israel mendesak agar memasok senjata, Nixon menyetujui untuk mengirimkan paket persenjataan sebesar \$2,2 miliar ke Israel (Iqbal, 2018).

Tak hanya itu, ketika Saddam Husein menyerbu negara tetangganya, Kuwait, negara kecil yang kaya minyak pada musim panas, Agustus 1990, Tim Kebijakan Luar Negeri Bush membentuk koalisi dengan melibatkan sekutu NATO, negara-negara Timur Tengah seperti Aarab Saudi, Suriah dan Mesir untuk menentang agresi Irak (State, n.d.). Pada saat invansi, kelompok-kelompok pertempuran dipimpin oleh USS Independence (CV-62) dan USS Dwight D. Eishenhower (CVN-69) melaju dari Samudra Hindia dan Mediterania Timur menuju Teluk Oman dan Laut Merah, keduanya bersiap memulai pertempuran (US Navy, 2012).Sementara itu Irak membangun pendudukan pasukannya di Kuwait sekitar 300.000 tentara. Saddam Hussein berulang kali menolak meninggalkan invansi Kuwait menyebabkan serangan koalisi atas pasukan Irak dimulai pada 16-17 Januari 1991, yang dikenal sebagai *Operation Desert Storm* dengan Amerika Serikat sebagai pemimpin koalisi mengatur diplomasi kampanye udara selama berlangsungnya perang. (Encyclopaedia Britannica, n.d.).

Selama berminggu-minggu Amerika Serikat dan koalisinya menempatkan lebih dari 900.000 tentara di Kuwait dan sebagian besar ditempatkan di perbatasan Saudi-Irak (Taylor, 2016).. Pasukan koalisi berhasil mengusir Irak dengan cepat dan mencapai gencatan senjata dalam 100 jam. Serangan

tersebut telah memberikan kerugian besar bagi Irak dengan korban yang mencapai puluhan ribu sedangkan pasukan koalisi hanya memakan ratusan korban (Taylor, 2016).

B. Keterlibatan Amerika dan Uni Soviet selama Perang Dingin di Timur Tengah

Perang dingin menjadi sebuah fase adu kekuatan dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, khususnya di kawasan Timur Tengah. Kekuatan ideologi yang berbeda menuntut keduanya untuk memperluas pengaruh hingga kawasan Timur Tengah.

Perang Dunia II yang berakhir pada tahun 1945 telah memberikan panggung baru bagi blok Barat Amerika Serikat dan Blok Timur Uni Soviet. Awalnya kedua negara memiliki hubungan cukup baik. Keduanya bahu membahu dalam menghadapi negara-negara fasis seperti Italia, Jepang dan Jerman terutama dalam menakhlikkan Adolf Hitler yang memimpin NAZI di Jerman (Saputra, 2014, p. 51).

Tahun 1943 menjadi kemunduran bagi NAZI, mereka diusir dari Eropa Timur, setelah melanggar pakta non-agresi dan menyerang Uni Soviet pada bulan Juni 1941. Pasca Perang, Uni Soviet mengubah strategi pendudukannya atas Eropa Timur, yakni menunjuk penduduk setempat yang pro-komunis untuk memerintah negara-negara dibawah pengawasan Moskow. Bersamaan dengan itu, Stalin berupaya untuk membangun kembali ekonomi Soviet melalui pembangunan industri berat dan militer serta menindak tegas pembangkang (Saputra, 2014, p. 52).

Konfrontasi mendasar keduanya muncul dari cara pandang (ideologi) yang berbeda. Ketika Perang Dingin, perbedaan ideologi keduanya cukup mecolok. Amerika Serikat berideologi Liberal-Kapitalis, sementara Uni Soviet menganut ideologi Sosial-Komunis. Perbedaan yang mencolok tersebut menjadikan kedua negara *superpower* menggalang dukungan dari negara-negara lain. Amerika Serikat membentuk Blok Barat dengan mayoritas anggotanya berasal dari negara-negara

Eropa Barat. Sedangkan Uni Soviet membentuk Blok Timur beserta negara-negara komunis, seperti Kuba dan Tiongkok (Saputra, 2014, pp. 52-23).

Pembentukan Blok Barat dan Blok Timur mempengaruhi kebijakan keduanya dalam pembangunan Jerman. Amerika Serikat beranggapan, bahwa pembangunan Jerman harus dimulai dengan membangun fondasi ideologi yang kuat dan pembentukan militer yang solid. Berbeda dengan Amerika Serikat. Menurut Uni Soviet, pembangunan Jerman dimulai dengan kekuatan fisik seperti kekuatan modal, sumber daya dan Industri. Perbedaan fondasi ini menyebabkan masing-masing dari mereka menerapkan prinsipnya pada wilayah Jerman yang dikuasai keduanya (Gunawan, 2018).

Pengaruh kekuatan keduanya, tidak hanya berlangsung di Jerman. Namun, juga menyasar negara-negara Asia, Amerika Selatan dan Afrika. Kala itu, Amerika Serikat menyembunyikan motif politiknya melalui kepentingan ekonomi Amerika Serikat (Lontar.id, 2019). Sebut saja, tatkala Amerika hendak menguasai transportasi, sumber daya alam seperti logam, minyak dan gas disamakan sebagai keinginan untuk pencegahan islamisasi negara-negara Timur Tengah atau hendak menghentikan penyebaran komunisme di Kawasan Asia dan Amerika Latin (Lontar.id, 2019).

Menguatnya Perang Dingin, telah menjadikan Amerika Serikat khawatir terhadap ekspansionisme Politik Uni Soviet di Timur Tengah. Sehingga Amerika Serikat harus segera meletakkan dasar-dasar kebijakan politiknya di Timur Tengah guna menghambat ekspansionisme Uni Soviet dan melindungi kepentingan vital Amerika Serikat di kawasan tersebut (Jatmika, 2000, p. 137).

Kepentingan vital dan strategis Amerika Serikat dalam Jatmika (2015), tampak dari pidato mantan Presiden Gerald Ford (1974-1977) di San Francisco pada bulan Oktober 1975:

“American concern for the Middle East is not a matter of choice’ it is a matter of vital necessity. It is a strategist part of the world and source of significant and growing portion of our energy resources and those of Western Europe and Japan”

Presiden ke-39 Amerika Serikat, Jimmy Carter melalui *Doctrin Carter* menegaskan *“Persian Gulf an are of “vital interest” to United States, Which world, of necessary, be defended militarily”*. Argumen dari kedua Presiden Amerika Serikat tersebut cukup menggambarkan urgensi dan strategisnya kawasan Timur Tengah bagi Amerika Serikat (Jatmika, 2000, p. 137).

Graham E. Fuller (1990) menyimpulkan, secara historis kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah telah difokuskan pada empat isu utama sebagai berikut:

1. Melindungi sumber daya energi di Timur Tengah;
2. Melestarikan keamanan dan kesejahteraan Israel;
3. Membantu rezim yang bersahabat di kawasan Timur Tengah dalam rangka meningkatkan stabilitas kawasan;
4. Memelihara pengaruh politik Amerika Serikat dan akses komersial di kawasan Timur Tengah;

Keempat kepentingan diatas mewakili kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah pada masa Perang Dingin. Bahkan terkadang Amerika Serikat juga mengejar keinginan-keinginan yang bersifat rahasia (Fuller, 1990, pp. 420-421).

Strategis dan pentingnya kawasan Timur Tengah juga telah menarik Uni Soviet untuk turut serta dalam Perang Dingin. Awal masuknya Perang Dingin, Josef Stalin mendukung berdirinya Israel dan berharap negara Yahudi tersebut menjadi sekutu Uni Soviet di Timur Tengah. Bahkan Moskow memasok senjata kepada kelompok zionis ke Timur Tengah melalui Cekoslowakia. Peran Uni Soviet ini memainkan peran penting dalam kemenangan Israel pada 1948. Namun, kedeka-

tan keduanya tidak berlangsung lama. Hubungan keduanya memburuk pasca Golda Meir, Dubes Israel untuk Uni Soviet menyinggung isu emigrasi orang-orang Yahudi ke Israel (Yegorov, 2017).

Sebulan setelah naiknya Gamal Abdel Nasser menjadi presiden pertama negara republik Mesir yang menjadikan Mesir negara sosialis satu partai Islam, Mesir mengalami krisis politik internasional. Perihal ini mencuat karena Mesir menjalin perjanjian senjata dengan Uni Soviet, sehingga berdampak pada kebijakan Amerika Serikat dan Inggris yang memutuskan pengambilalihan kuasa pembiayaan bendungan Sungai Nil (Gunawan, 2019). Akibatnya hubungan Amerika Serikat di Timur Tengah memburuk, namun wilayah ini tidak akan luput dari perhatian Amerika Serikat hingga berakhirnya Perang Dingin (History.com, 2019).

Menanggapi langkah Amerika Serikat, Nasser mengambil alih kanal Suez dari penguasaan Inggris dan Perancis. Nasser menetapkan pajak bagi pihak yang melintasi jalur ini. Tentu saja kebijakan ini menjadi gangguan bagi Inggris, Israel dan Perancis. Ketiga negara ini memutuskan untuk menyerang Mesir. Uni Soviet tidak tinggal diam, mendapatkan sekutunya diserang. Uni Soviet membekingi Mesir memukul mundur pasukan zionis dan negara Eropa tersebut (Gunawan, 2018).

Selain Mesir, Amerika Serikat pernah memiliki hubungan baik dengan Iran pada masa Dwight Eisenhower. Eisenhower memberikan bantuan nuklir antara tahun 1957 dan 1979. Kala itu, bantuan nuklir merupakan bagian dari strategi perang dingin yang dikenal sebagai "*Atoms for Peace*". Di dalamnya Eisenhower berharap dapat melakukan control senjata dan berbagi nuklir dapat mengurangi intensitas negara mengembangkan nuklir. Eisenhower memandang penyediaan teknologi kepada negara lain sebagai sarana mendapatkan pengaruh dan mencapai tujuan politik terhadap negara lain.

Pada saat itu, hubungan Iran yang dipimpin Shah Mohammad Reza Pahlevi dan Amerika Serikat begitu erat. Tujuan Amerika Serikat menjalin kerjasama nuklir dengan Iran karena letak geografis Iran yang berbatasan langsung dengan Uni Soviet. Harapannya selama awal Perang Dingin Amerika Serikat dapat memantau aktivitas Uni Soviet (Little B. , 2018).

Akhir ketegangan dua negara adidaya ini dengan diadakannya pertemuan di Malta tahun 1989. Keduanya membuat kesepakatan setelah dua hari melewati perundingan di atas kapal perang Maxim Gorky, milik Uni Soviet yang tengah bersandar di Malta (Tuwo, 2016) .

Dikutip dari laman BBC History, pemimpin Uni Soviet, Mikail Gorbachev mengatakan “*Saya memastikan kepada Presiden Amerika Serikat, bahwa saya tidak akan memulai peperangan melawan Amerika Serikat*”.

Selaras dengan ucapan Gorbachev, George Bush senior menyatakan negaranya memiliki niat untuk menjalin hubungan baik dengan Uno Soviet.

“Kami menyadari tentang perdamaian abadi dan transformasi hubungan Timur dan Barat yang dapat menjadi kerjasama yang berkesinambungan” Ucap Bush

Usai pertemuan keduanya, muncul beberapa perjanjian hingga pada 31 Juli 1991, Presiden Bush dan Gorbachev menandatangani perjanjian START (*Strategic Arms Reduction Treaty*) yang berisi pengurangan penggunaan senjata. Proses negosiasi berkaitan tentang pengurangan penggunaan senjata nuklir sebesar 35 persen dan pemotongan rudal balistik antar benua yang berbasis darat Uni Soviet akan dipotong sebesar 50 persen. Meski demikian, Amerika Serikat masih meninggalkan 9.000 hulu ledak dan Uni Soviet masih meninggalkan 7.000 hulu ledak (Republika, 2019).